

ILMU dan BUDAYA

- **The Need Of Collective Action In Business Sector**
- **Alih Kode Dan Campur Kode**
 - **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sistem Bagi Hasil Kepada Nasabah Perbankan Syariah**
- **Klasifikasi Jenis Gulai Adat Masyarakat Batak Angkola**

DAFTAR ISI

No		Hal
I.	Pengantar	iii
II.	The Need Of Collective Action In Business Sector _____ Kumba Digidowiseiso	2873
III.	Mengukur Tingkat Sensitivitas NPL Terhadap <i>Earning Power</i> Perbankan _____ Khairul Saleh Lumban Tobing	2887
IV.	Perbandingan Strategi Pembangunan Antara Indonesia Dengan China _____ Adi Susilo Jahja	2905
V.	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sistem Bagi Hasil Kepada Nasabah Perbankan Syariah _____ Suparno	2917
VI.	Klasifikasi Jenis Gulai Adat Masyarakat Batak Angkola _____ Etti Sartina Siregar	2945
VII.	Alih Kode Dan Campur Kode _____ Syahfitri Purnama	2959
VIII.	Dampak Pengeluaran Pemerintah Daerah Dan Investasi Terhadap Fiskal Daerah Pada Era Otonomi _____ Yurianto, Bonar M.Sinaga, Sugiharso Safuan, Noer Azam Achsani	2971

PERBANDINGAN STRATEGI PEMBANGUNAN ANTARA INDONESIA DENGAN CINA

Adi Susilo Jahja

Abstract

Differences in political and economic context have led to the developed pattern of differences and similarities between Indonesia and China. In conducting her development strategy, Indonesia stresses on a radical reform to boost growth on one hand. On other part, China's reforms are implemented with a more gradual approach. In China Higher growth is materialized, but Indonesia's economy is more evenly distributed. Indonesia, anyhow, could take a lesson from China in terms of property rights protection and contract enforcement, protection of markets from political interests, and decisive action against corruption practices.

Key words: strategy development, economic reform; Indonesia, China.

A. Pendahuluan

Setahun setelah perjanjian ACFTA, ekspor Indonesia ke Cina meningkat dari 8,9 miliar dolar AS pada 2009 menjadi 14,1 miliar dolar AS pada 2010, yang berarti kenaikan sebanyak 58,4 persen. Sementara itu impor nonmigas dari Cina meningkat dari 13,5 miliar dolar AS tahun 2009 menjadi 19,7 miliar dolar AS pada 2010, berarti pertumbuhannya 45,9 persen. Pada tahun 2010 defisit perdagangan dengan Cina 5,6 miliar dolar AS, sedangkan tahun 2009 sebesar 4,6 miliar dolar (Basri, 2011).

ACFTA ditandatangani karena negara-negara ASEAN lain menghendaknya sehingga dalam perundingan Indonesia berada dalam tekanan untuk ikut menyetujui. Cina merupakan pasar yang luar biasa besar dengan tingkat kemakmuran yang semakin meningkat. Ini merupakan peluang bagi negara pengekspor, apalagi bila segala macam hambatan terhadap negara-negara tertentu seperti ASEAN dihapus dan terhadap negara lain tidak. Di sisi lain, dengan adanya perdagangan bebas dengan Cina, arus penyelundupan barang dari Cina secara otomatis akan hilang (Tarmidi, 2010).

Kini Cina merupakan negara eksportir terbesar di dunia, mengalahkan Jerman, serta merupakan negara importir terbesar kedua di dunia. Indonesia merupakan mitra perdagangan terbesar ke empat di ASEAN, sementara Cina merupakan tujuan impor terbesar dan ekspor terbesar ke empat bagi

PERBANDINGAN STRATEGI PEMBANGUNAN ANTARA INDONESIA DENGAN CHINA

Adi Susilo Jahja

Abstract

Differences in political and economic context have led to the developed pattern of differences and similarities between Indonesia and China. In conducting her development strategy, Indonesia stresses on a radical reform to boost growth on one hand. On other part, China's reforms are implemented with a more gradual approach. In China Higher growth is materialized, but Indonesia's economy is more evenly distributed. Indonesia, anyhow, could take a lesson from China in terms of property rights protection and contract enforcement, protection of markets from political interests, and decisive action against corruption practices.

Keywords: strategy development, economic reform, Indonesia, China

PENDAHULUAN

Setahun setelah perjanjian ACFTA, ekspor Indonesia ke China meningkat dari 8,9 miliar dolar AS pada 2009 menjadi 14,1 miliar dolar AS pada 2010, yang berarti kenaikan sebanyak 58,4 persen. Sementara itu impor nonmigas dari China meningkat dari 13,5 miliar dolar AS tahun 2009 menjadi 19,7 miliar dolar AS pada 2010, berarti pertumbuhannya 45,9 persen. Pada tahun 2010 defisit perdagangan dengan China 5,6 miliar dolar AS, sedangkan tahun 2009 sebesar 4,6 miliar dolar (Basri, 2011).

ACFTA ditandatangani karena negara-negara ASEAN lain menghendaknya sehingga dalam perundingan Indonesia berada dalam tekanan untuk ikut menyetujui. China merupakan pasar yang luar biasa besar dengan tingkat kemakmuran yang semakin meningkat. Ini merupakan peluang bagi negara pengekspor, apalagi bila segala macam hambatan terhadap negara-negara tertentu seperti ASEAN dihapus dan terhadap negara lain tidak. Di sisi lain, dengan adanya perdagangan bebas dengan China, arus penyelundupan barang dari China secara otomatis akan hilang (Tarmidi, 2010).

Kini China merupakan negara eksportir terbesar di dunia, mengalahkan Jerman, serta merupakan negara importir terbesar kedua di dunia. Indonesia merupakan mitra perdagangan terbesar ke empat di ASEAN, sementara China merupakan tujuan impor terbesar dan ekspor terbesar ke empat bagi Indonesia (Kompas.com, 24 Agustus 2009). Kinerja ekonomi China dalam

dua dekade belakangan ini menurut ukuran sejarah dunia dinilai “spektakuler” (Wattanapruttipaisan, 2005:10).

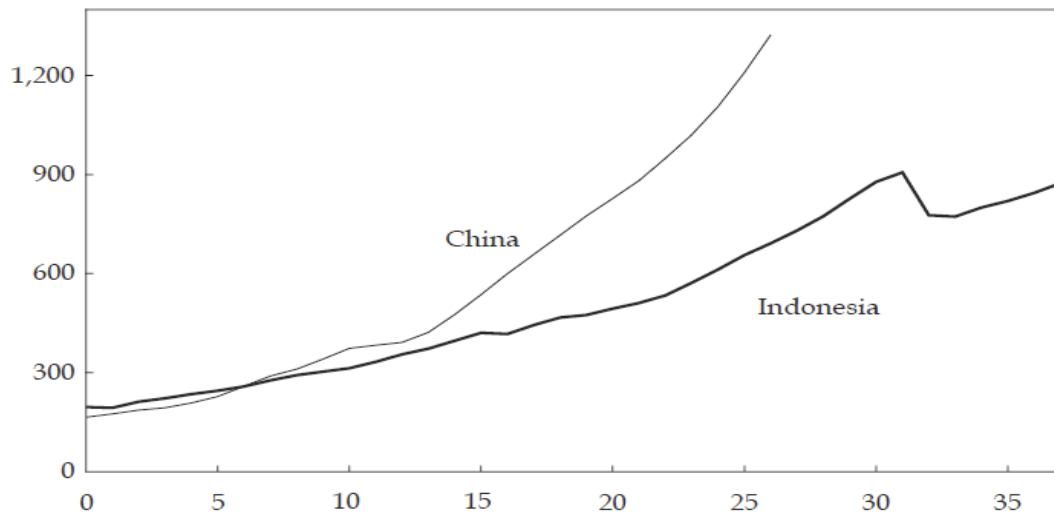
China merupakan negara dengan PDB terbesar ketiga di dunia setelah Amerika dan Jepang dengan penduduk sebanyak 1,3 miliar orang, sedangkan jumlah penduduk Indonesia seperenamnya. Dalam tiga puluh tahun belakangan PDBnya tumbuh sekitar 10% per tahun, sementara pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 6% per tahun. Indonesia dewasa ini merupakan negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia setelah China dan India

Tulisan ini bermaksud membandingkan antara strategi pembangunan Indonesia dengan China, kemudian menarik pelajaran yang dapat diambil oleh Indonesia dari perbandingan tersebut. Pembahasan difokuskan pada reformasi ekonomi yang telah dilakukan oleh kedua negara, dengan menyadari bahwa persoalan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari perkembangan politik.

POLA PERTUMBUHAN

Perbandingan ekonomi Indonesia dengan China dijelaskan oleh Hofman dkk. (2007:171-199). Pertumbuhan ekonomi Indonesia dan China dihitung sejak reformasi masing-masing negara dapat dilihat dalam Gambar 1. Reformasi di Indonesia dihitung sejak tahun 1966 sedangkan China dimulai sejak 1978.

Gambar 1 Pertumbuhan PDB per kapita China dan Indonesia



Sumber: Hofman dkk., 2007:173

Pada tahun 1978 PDB per kapita China sebesar \$165, sementara Indonesia pada tahun 1966 sebesar \$195. Dalam jangka waktu seperempat abad China telah melipatgandakan GDP per kapita sebanyak tujuh kali lipat, sementara Indonesia dalam waktu yang lebih panjang hanya mencapai empat kali lipat. Ekonomi China hampir selalu tumbuh tinggi, sedangkan Indonesia sempat mengalami variasi arena adanya krisis ekonomi Asia.

Dibandingkan dengan China, angka kemiskinan di Indonesia lebih kecil. Bila diukur dengan ukuran Bank Dunia yaitu konsumsi dengan paritas daya beli \$1per hari, angka kemiskinan di Indonesia pada tahun 2006 sebesar 7,4%, sementara di China sebesar 10,3% pada tahun 2004. Hal ini karena distribusi pendapatan di Indonesia lebih merata.

Gambar 2 Tabungan dan Investasi



Sumber: Hofman dkk., 2007:177

Gambar 2 menunjukkan bahwa rasio investasi terhadap GDP China lebih tinggi, didorong oleh tabungan domestik yang tinggi. Sebelum reformasi China telah banyak melakukan investasi besar-besaran, dimana pembentukan modal tetap bruto sebesar 30% dari PDB, sementara investasi dan tabungan Indonesia tumbuh cepat setelah tahun 1966 dan menurun tajam saat krisis moneter 1998.

Pergeseran sektor ekonomi, perdagangan yang semakin terbuka, persaingan, perubahan struktur kepemilikan dan urbanisasi merupakan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap *total factor productivity* yang berdampak pada pertumbuhan PDB di kedua negara. Kedua negara mengalami penurunan sektor pertanian yang relatif tajam selama periode reformasi. Sebagaimana nampak pada gambar 3, bagi China pergeseran sektoral terjadi dari sektor pertanian ke jasa, sementara Indonesia menunjukkan pergeseran yang lebih besar ke arah industri.

Gambar 3 Perubahan Struktural

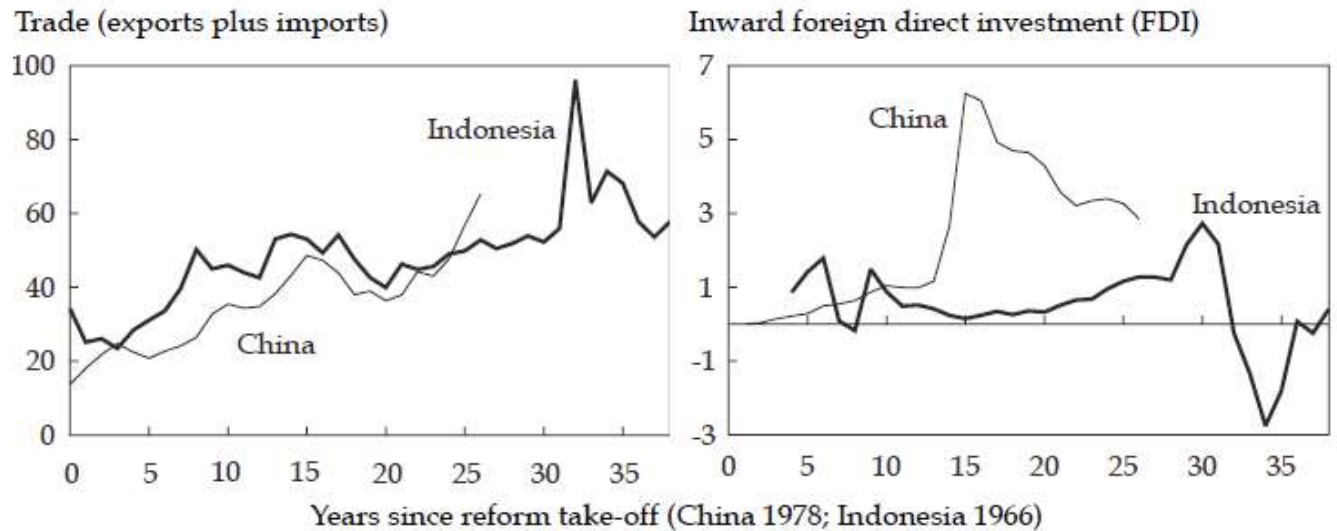


Sumber: Hofman dkk., 2007:179

Perubahan struktural lainnya pada kedua negara tersebut adalah ekonomi yang semakin terbuka (gambar 4). Ekspor Indonesia pada tahun 1960an dan 1970an didominasi oleh migas, pertanian dan sumber daya alam lainnya, namun reformasi tahun 1980an mengubah proporsi ekspor barang manufaktur dari 3% pada tahun 1980 hingga sekitar 56% di tahun 2004. China telah mencapai level itu pada pertengahan tahun 1980an, dan kini proporsinya sekitar 90%.

Indonesia telah membuat kebijakan yang aktif terhadap penanaman modal asing (PMA). Pada awal 1970an peran PMA sekitar 2% dari PDB, kemudian ada peristiwa Malari tahun 1974 yang menyebabkan pertumbuhan PMA melambat, namun ketika pertumbuhannya meningkat terjadilah krisis moneter. Kini peran PMA belum pulih seperti sebelum krisis. Sedangkan di China PMA bertumbuh lambat dan terbatas pada *special economic zone* (SEZ) hingga awal 1990an. Setelah diterapkannya ekonomi pasar, proporsi PMA terhadap PDB sempat tumbuh pesat.

Gambar 4. Ekonomi yang Semakin Terbuka



Sumber: Hofman dkk., 2007:180

STRATEGI PEMBANGUNAN

Kedua negara memusatkan perhatian pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi, menjadikannya sebagai legitimasi dari rejim yang berkuasa. Ketiadaan oposisi dan buruknya kondisi ekonomi merupakan landasan bagi Soeharto untuk menerapkan kebijakan ekonomi yang pragmatis. Sementara China telah menganut ideologi pasar sejak awal reformasi; dan pada tahun 1993 Kongres Partai Komunis secara resmi menerapkan ekonomi pasar sosialis, sehingga perdebatan ideologi menjadi usai (Hofman dkk., 2007:181). Strategi pembangunan kedua negara sebagaimana diterangkan di bawah ini terutama didasarkan atas penjelasan Hofman dkk. (2007:181-196).

China

Reformasi China dimulai sejak meninggalnya Mao Zedong tahun 1976, pada tahun 1978 Deng Xiaoping memulai terobosan reformasi yang dilanjutkan dengan komunike pada kongres partai yang menetapkan peralihan dari ekonomi perencanaan. Namun reformasi berjalan secara gradual mulai dari sektor pertanian, dimana pertanian secara kolektif diganti dengan sistem pertanggungjawaban rumah tangga dimana; yaitu tanah yang dimiliki secara kolektif diberikan

kepada rumah tangga individual dan mereka diberi kesempatan menjual outputnya setelah memenuhi kewajiban terhadap negara, yaitu menjual outputnya dengan harga yang ditentukan (Riedel dkk., 2007:5).

Reformasi sektor finansial dimulai tahun 1979, namun komersialisasi bank dilakukan setelah tahun 2000, disebabkan antara lain karena BUMN yang belum direformasi saat itu memerlukan bantuan keuangan untuk menjalankan fungsi sosialnya. Reformasi dilakukan dengan melakukan penambahan bertahap pada jenis dan jumlah bank, dikombinasikan pula dengan pelonggaran dan pengetatan pinjaman secara bertahap pula. People's Bank of China (PBC) dalam ekonomi perencanaan merupakan satu-satunya bank yang berfungsi sebagai bank sentral, bank komersial dan perbendaharaan negara. Reformasi diawali dengan memecah sistem satu bank menjadi empat bank spesialis. Bank-bank BUMN tersebut merupakan bank utama dalam proses reformasi, namun pangsa pasarnya secara bertahap berkurang dari hampir 100% pada tahun 1980an menjadi 55% di akhir 2005, karena persaingan dengan bank-bank swasta maupun lembaga keuangan non bank.

Awalnya *credit plan* merupakan instrumen kebijakan yang dominan, mengalokasikan kredit berdasarkan prioritas investasi pemerintah. Namun sejak undang-undang perbankan tahun 1994, *credit plan* dihapus dan bank lebih bebas memberikan pinjaman. Antara tahun 1996-2001 jumlah tenaga kerja bank BUMN dikurangi, kewajiban sosial bank dialihkan ke pemerintah daerah, banyak bank BUMN di merger atau ditutup. Jumlah bank komersial pada tahun 1992 sebesar 145.000 menjadi 80.000 di tahun 2005, rasio *non performing loan* (NPL) di tahun 2001 sebesar 30%, pada akhir 2006 sebesar 8%.

Hingga tahun 1978 China merupakan ekonomi yang tertutup, peran ekspor maupun interaksi finansial dengan negara lain amat terbatas. Sebelum reformasi, perdagangan internasional dilakukan melalui 12 perusahaan perdagangan luar negeri yang memiliki hak monopoli perdagangan dan dapat membeli dan menjual barang untuk impor dan ekspor dengan harga yang ditentukan. Secara bertahap perusahaan ini kehilangan hak monopoli perdagangan luar negeri, dan perusahaan ini ditutup pertengahan 1990an.

Pilar kedua dalam proses kearah ekonomi yang terbuka adalah reformasi secara bertahap pada sistem nilai tukar. Sebelumnya valuta asing dialokasikan sesuai perencanaan, valuta asing hanya dikelola oleh bank sentral. Pada tahun 1979 pemerintah mulai membolehkan perusahaan

dan pemerintah daerah memperoleh valuta asing sebagai bagian dari pendapatan mereka. Pada tahun ini juga diperkenalkan nilai tukar ganda untuk mendorong ekspor. Namun pada tahun 1995 ditetapkan nilai tukar yang sama.

Pilar ketiga adalah dibentuknya *special economic zone* (SEZ). Perusahaan-perusahaan dalam zona tersebut menikmati pengurangan pajak, infrastruktur dan layanan pemerintah yang lebih baik. Kebanyakan ekspor China berasal dari perusahaan asing yang berinvestasi di SEZ, yang ekspornya meningkat dari 1% pada tahun 1985 menjadi 50% pada tahun 2005.

Indonesia

Sejak 1966 reformasi dijalankan melalui beberapa gelombang. Peluang reformasi muncul terutama karena adanya krisis ekonomi seperti krisis hutang Pertamina tahun 1975 dan jatuhnya harga minyak dunia tahun 1980an. Reformasi diawali dengan pembangunan pedesaan dan swasembada pangan yang dinilai berhasil. Jumlah penduduk miskin turun dari sekitar 54 juta orang pada tahun 1976 menjadi 23 juta orang pada tahun 1996. Studi Bank Dunia mengatakan bahwa pada periode 1970-87 rata-rata penurunan kemiskinan absolut di Indonesia jauh lebih tinggi dibandingkan negara-negara berekonomi lainnya (Wie, 2007:271).

Indonesia juga melakukan reformasi sektor keuangan. Pada masa Soekarno ada satu bank yang memainkan peran bank sentral dan bank komersial. Pada tahun 1968 BI ditetapkan sebagai bank sentral. Pada tahun 1970an sistem perbankan didominasi oleh BUMN. Pemerintah mengambil peran dalam investasi melalui bank-bank BUMN dan meningkatkan jumlah permodalannya. Berbagai tujuan kebijakan industri dilakukan yang menghasilkan kenaikan hambatan impor, antara lain sebagai tanggapan atas permintaan akan proteksi. Namun jatuhnya harga minyak dunia serta meningkatnya defisit neraca berjalan pada awal 1980an menyebabkan pemerintah melakukan devaluasi mata uang pada bulan Maret 1983 serta September 1986. Sektor perbankan direformasi tahun 1983 dan Pakto 1988 dengan menurunkan hambatan masuk dan penghapusan subsidi kredit (Temple, 2001:25).

Liberalisasi perbankan menuntut regulasi yang lebih ketat, namun tidak pernah dijalankan secara penuh. Pada saat krisis moneter yang dimulai tahun 1997, ketidakpastian mengenai kesehatan bank serta jaminan deposito yang terbatas, telah menyebabkan pemindahan besar-besaran uang masyarakat dari bank swasta ke bank BUMN atau digunakan untuk spekulasi.

Selanjutnya dibawah pengawasan IMF Indonesia harus menutup 16 bank dan menyehatkan 34 bank lainnya. Setelah melakukan restrukturisasi perbankan, jumlah bank berkurang dari 240 menjadi 138 bank di tahun 2003.

Pada tahun 1966-1970 Indonesia melakukan upaya menjadikan ekonominya lebih terbuka dengan penyederhanaan rejim nilai tukar, pengurangan perlakuan istimewa terhadap perusahaan milik pemerintah, pemberlakuan UU penanaman modal asing dan domestik. Pertengahan 1970an Indonesia mengalami *oil boom*, serta terjadi pula peristiwa Malari, menyebabkan pemerintah lebih mengetatkan penanaman modal asing. Disamping itu diterapkan pula kebijakan meningkatkan hambatan tarif dan non tarif untuk melindungi industri dalam negeri.

Setelah *oil boom* berakhir dan terjadi kenaikan defisit neraca berjalan, Indonesia kembali menjadi negara yang *outward-looking*, menerapkan strategi industrialisasi, reformasi perdagangan dengan mengurangi aturan yang menghambat ekspor, mengenakan *valu added tax* serta pajak kepemilikan di tahun 1983. Pemerintah juga membebaskan pajak impor terhadap perusahaan yang berorientasi ekspor. Tahun 1985 dibentuk pula Tim Tarif untuk mengendalikan proses penerapan tarif, sehingga rata-rata tariff turun dari 27% (1985), 20% (1994) hingga mencapai 6,4% (2004). Disamping itu karena layanan bea cukai yang korup dan tidak efisien, pekerjaannya dikontrakkan ke perusahaan Swiss, sehingga meningkatkan volume perdagangan dan pendapatan tarif. Antara tahun 1983 hingga 1992 peran manufaktur dalam nilai ekspor naik dari 7% menjadi hampir 50% (Temple, 2001:25). Kemudian pada tahun 1990an pemerintah juga meliberalisasi penanaman modal asing dengan mengenakan "one-stop shop" (BKPM) serta menghapus daftar negatif investasi.

PEMBAHASAN

Dalam perjalanannya, reformasi China dapat berjalan baik tanpa menjalankan secara penuh liberalisasi, privatisasi dan bahkan demokrasi, sebagaimana yang dilakukan oleh Indonesia. Pendapat yang umumnya berkembang adalah bahwa mekanisme perencanaan tanpa liberalisasi akan menyebabkan distorsi dan tidak berdampak pada pertumbuhan, tanpa privatisasi dan jaminan kepemilikan pribadi tidak akan menumbuhkan insentif pasar, tanpa demokrasi reformasi ekonomi kehilangan landasan dan komitmen pasar dan menyebabkan kerentanan. Namun faktanya tidak demikian, sehingga menimbulkan kesalahpahaman sebagai berikut (Qian, 2002:3-

7).

Kesalahpahaman pertama, pandangan bahwa penanaman modal asing (PMA) dan ekspor merupakan pendorong keberhasilan China. Peran PMA terlalu dibesar-besarkan. PMA dimulai baru pada tahun 1993 dan perannya hanya 10 persen dari jumlah investasi secara keseluruhan. Ekspor China tumbuh cepat, tetapi perannya tidak besar dalam perekonomian. Ekspor China terkonsentrasi pada provinsi-provinsi pesisir, namun faktanya pertumbuhan ekonomi terjadi merata di seluruh negeri. Rusia ekonominya lebih terbuka dibanding China tetapi pertumbuhan ekonominya tidak lebih tinggi dari China. Kesalahpahaman yang kedua adalah bahwa keberhasilan China terutama disebabkan oleh reformasi pertanian pada awal 1980an. Reformasi pertanian China memang berhasil, dan sebabnya adalah karena keberhasilan keluarga berencana, liberalisasi pasar, dilakukannya investasi infrastruktur serta penelitian dan pengembangan pada tahun 1970an. Pemerintah juga berperan penting dalam pemasaran hasil-hasil pertanian.

Qian (2002:7) mengemukakan bahwa para ekonom umumnya berpandangan bahwa tenaga kerja, modal fisik, modal manusia dan produktivitas merupakan penentu utama pertumbuhan ekonomi. Namun perubahan terhadap faktor-faktor tersebut bersifat *endogenous*, tergantung pada perbaikan teknologi, efisiensi alokasi dan insentif, yang dibentuk oleh institusi. Dengan demikian ekonomi pasar yang baik bukan saja “*getting prices right*” tetapi juga “*getting property rights right*” serta “*getting institutions right*”. Dengan demikian transisi yang memfokuskan pada stabilisasi, liberalisasi dan privatisasi tidaklah cukup, harus memperhatikan dimensi institusional. Maka institusi itu penting untuk pertumbuhan yang berkelanjutan, termasuk perlindungan hukum terhadap hak kepemilikan, penegakan kontrak melalui peradilan yang independen, peraturan pemerintah untuk menjamin persaingan pasar, sistem keuangan yang transparan dan sebagainya. Hal-hal seperti itu sesungguhnya telah berlaku pada negara-negara yang ekonominya sudah maju. Selama tiga dekade ini China telah membuktikan diri sangat inovatif dalam membuat kebijakan dan institusi untuk mengelola perubahan yang kompleks pada perekonomiannya tanpa menimbulkan kekacauan sistemik (Heilmann, 2008:2).

Riedel (2007:1) berpendapat bahwa reformasi yang dilakukan China tidak dengan serta merta menyebabkan pertumbuhan dan perubahan struktural, tetapi menghadirkan insentif dan institusi yang tidak terdapat dalam sistem ekonomi sosialis, padahal merupakan prasyarat penting untuk pertumbuhan dan perubahan struktural. Selanjutnya para pelaku dalam sistem ekonomi

baik individu, BUMN, perusahaan swasta dan pemerintah merespon insentif dan institusi tersebut.

Menurut Balcerowicz (dalam Lenger, 2008:4), ada dua jenis transisi dari sosialisme ke ekonomi pasar, yaitu *bigbang* dan *gradualism*. Yang pertama yaitu program ekonomi yang radikal dan komprehensif, dimana stabilisasi ekonomi makro, liberalisasi ekonomi mikro, serta restrukturisasi fundamental dilakukan pada saat yang sama dan dijalankan sesegera mungkin. Yang kedua adalah program ekonomi yang non-radikal, dimana stabilisasi, liberalisasi dan restrukturisasi tidak dilakukan secara serentak, atau dengan kata lain, dijalankan perlahan tapi pasti.

China menempuh reformasi secara gradual dan eksperimental karena beberapa alasan (Hofman dkk., 2007:181-183). Pertama, gradualisme merupakan cara untuk menghindari resistensi politis terhadap reformasi. Kedua, reformasi secara gradual dan eksperimental pendekatan yang pragmatis dalam lingkungan yang penuh distorsi, dimana pendekatan '*first best solution*' tidak dapat dengan serta merta diterapkan. Reformasi secara eksperimental dilakukan pada sektor atau daerah tertentu terlebih dahulu, sehingga pemerintah dapat mengumpulkan informasi mengenai dampak kebijakan yang belum bisa diperkirakan sebelumnya. Jika kebijakan ini berhasil, maka kebijakan ini dapat diterapkan di tempat lain. Ketiga, reformasi experimental cocok dengan budaya China. Bila eksperimen tidak berjalan baik, eksperimen dapat dihentikan dan pejabatnya tidak 'kehilangan muka'.

Sebagai contoh, dalam kebijakan reformasi sektor keuangan, China melakukannya secara gradual sementara Indonesia melalui Pakto 1988 melakukannya secara '*big bang*'. Hasilnya berbeda. China tetap kondusif dalam menghadapi krisis ekonomi 1997, Indonesia sebaliknya. Sistem keuangan China mampu memobilisasi dana dalam jumlah yang lebih besar. M2 (*broad money*) per GDP di China meningkat dari 24% pada saat awal reformasi, menjadi 150% pada tahun 2005. Sementara Indonesia peningkatannya dari 7% menjadi 43% (Hofman dkk., 2007:194).

Dalam sistem politik yang berlaku, China menegakkan aturan mengenai perlindungan hak milik dan pelaksanaan kontrak, juga berhasil melindungi pasarnya dari kepentingan politik. China juga melakukan desentralisasi politik yang membatasi kekuasaan politik pemerintah pusat terhadap kebijakan ekonomi, namun tetap merangsang persaingan antar pemerintah daerah

dengan memberikan insentif kepada daerah yang ekonominya maju. Namun China menerapkan aturan yang tegas terhadap tindak pidana korupsi, meskipun korupsi tetap saja terjadi (Hofman dkk., 2007:184; Montinola dkk., 1995:20).

SIMPULAN

China telah menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat daripada Indonesia, namun dari segi pemerataan Indonesia lebih baik. Pertumbuhan ekonomi yang pesat tersebut karena bentuk reformasi China yang lebih gradual dengan memperhatikan nilai dan budaya yang ada, sementara Indonesia melakukannya dengan pendekatan yang berbeda.

Kini sistem demokrasi Barat telah diterapkan di Indonesia Setelah tiga kali pemilihan umum Indonesia dinilai oleh berbagai pihak sebagai negara demokrasi yang berhasil. Indonesia juga dinilai merupakan sebuah negara yang mampu mengembangkan dan memelihara institusi demokrasi (Anfrel, 2009:15). Pada tahun 2005 Freedom House mengumumkan bahwa Indonesia telah berubah statusnya dari negara yang "*partly free*" menjadi "*free*" (Mahbubani, 2008). Indonesia juga lebih siap menghadapi krisis keuangan global 2008-09 karena telah meningkatkan kemampuannya setelah terpukul krisis 1997-08. Sehingga, apakah pendekatan gradual cocok untuk diterapkan di Indonesia atau tidak, agaknya perlu pengkajian lebih lanjut.

Namun hal-hal yang positif seperti perlindungan hak milik dan pelaksanaan kontrak, perlindungan pasar dari kepentingan politik, tindakan yang tegas terhadap pelaku korupsi, merupakan pelajaran penting bagi Indonesia.

Daftar Pustaka

- Anfrel. 2009. A Decade of Democracy in Indonesia: The 2009 Legislative Election Report of International Election Observation Mission The Asian Network for Free Elections (ANFREL). Dalam
http://www.anfrel.org/report/indonesia/2009/Indonesia_General_Election_2009.pdf
- Basri, Faisal. 2011. ASEAN-China FTA: Pemerintah Abai? Kompas, 11 April. Dalam
<http://nasional.kompas.com/read/2011/04/11/03235537/> jam 21.08. 9 Juni 2012.
- Hofman, Bert, Min Zhao, and Yoichiro Ishihara. 2007. Asian Development Strategies: China and Indonesia Compared. Bulletin of Indonesian Economic Studies, Vol. 43, No. 2 . Pp. 171–99
- Heilmann, Sebastian. 2008. Policy Experimentation in China's Economic Rise. St Comp Int Dev 43:1–26. DOI 10.1007/s12116-007-9014-4
- Kompas. 21 Januari 2010. CAFTA Paling Berat Buat RI.
- Kompas.com, 24 Agustus 2009 China Optimistis FTA di Awal 2010. Dalam
<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2009/08/24/15170956/China.Optimistis.FTA.di.Awal.2010>. Jam 21.00. 8 Pebruari 2010.
- Lenger, Alexander. 2008. Big-bang versus Gradualism? Towards a Framework for Understanding Institutional Change in Central and Eastern Europe. Prepared for the spring conference "Ökonomik, Politische Ökonomie und Psychologie staatlicher Reformen in Europa", 10.-11. April 2008, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. Arbeitskreis Politische Ökonomie in Verbindung mit dem Arbeitskreis Europäische Integration, dem Walter Eucken Institut, Freiburg im Breisgau und dem ZEW Mannheim.
- Mahbubani, Kishore. 2008. Indonesia's miraculous 'free' democracy. The Japans Time Online, Monday, Sept. 22, 2008. Dalam <http://search.japantimes.co.jp/cgi-bin/eo20080922a1.html>
- Montinola, Gabriella, Yingyi Qian, and Barry R. Weingast. 1995. Federalism, Chinese Style: The Political Basis for Economic Success in China. World Politics. October 1995, 48(1), pp. 50-81
- Qian, Yingyi. 2002. How Reform Worked in China. William Davidson Working Paper Number 473, June 2002. The William Davidson Institute At The University of Michigan Business School.
- Riedel, James, Jing Jin & Jin Gao. 2007. How China Grows: Investment, Finance, and Reform. Dalam <http://press.princeton.edu/chapters/s8443.html>. Jam 05.09. 21 Januari 2010.

Temple, Jonathan. 2001. Growing into Trouble: Indonesia after 1966. Department of Economics, University of Bristol, 8 Woodland Road, Bristol BS8 1TN, UK and CEPR. Discussion Paper 01/552. This paper was prepared for the conference “Analytical Country Studies on Growth” organized by Dani Rodrik at the Center for International Development, Harvard, April 20-21, 2001.

Tarmidi, Lepi T. 2010. ACFTA Sudah Terlanjur. Dalam Kompas, 22 Januari 2010.

Wattanapruittipaisan, Thitapha. 2005. Background Note on China and ASEAN Part One: The Rise of China as an Economic Power. Bureau for Economic Integration ASEAN Secretariat.

Wie, Thee Kian. 2007. Indonesia's Economic Performance under Soeharto's New Order. Seoul Journal of Economics. Seoul: Summer 2007. Vol. 20, Iss. 2; pg. 263, 19 pgs.

Judul Makalah : **PERBANDINGAN STRATEGI PEMBANGUNAN ANTARA**
INDONESIA **DENGAN CHINA**

Nama Penulis : **ADI SUSILO JAHJA**

No. HP : **0816 1829 851**

Email : **susilohj@gmail.com**